

Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2023

Dwi Nur Maulidia

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Parikesit Penangsang

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Alamat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur (60118)

Korespondensi penulis: dwiinurr1753@gmail.com dan parikesit_1@untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze financial ratios as a tool to measure the financial independence of the regional government of Sidoarjo Regency during the fiscal years 2019-2023. The data used was obtained from the Sidoarjo Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The results of the analysis show that the average financial independence ratio reaches 69.98%, which is included in the participatory category. However, the average dependency ratio of 57.48% indicates a very high level of dependence on external funding. Furthermore, the average efficiency ratio is 106.90%, which means that local governments are not efficient in managing their budgets. Meanwhile, the average fiscal decentralisation ratio of 40.16% is good, indicating the potential to increase financial independence. These findings provide a comprehensive picture for decision-makers to formulate more effective strategies to improve regional financial independence.*

Keywords: *financial ratio, Financial independence, regional government.*

Abstrak. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan hal ini sangat penting untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan sebagai alat untuk mengukur kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2019-2023. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan rata-rata mencapai 69,98%, yang termasuk dalam kategori partisipatif. Namun, rasio ketergantungan rata-rata sebesar 57,48% menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendanaan

eksternal. Selain itu, rasio efisiensi tercatat rata-rata 106,90%, yang berarti pemerintah daerah tidak efisien dalam pengelolaan anggarannya. Sementara itu, rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 40,16% tergolong baik, menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangan. Temuan ini memberikan gambaran komprehensif bagi pengambilan kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: rasio keuangan, kemandirian keuangan, pemerintah daerah.

LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan bagi pemerintah daerah adalah mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kemandirian ini sangat penting untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Kemandirian keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ini penting untuk menilai sejauh mana daerah dapat mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri.

Kemandirian keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ini penting untuk menilai sejauh mana daerah dapat mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Di Indonesia, banyak daerah yang masih memiliki tingkat Ketergantungan yang tinggi di pendapatan daerahnya terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sehingga, hal tersebut dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

Analisis rasio keuangan menjadi alat penting untuk mengukur kemandirian keuangan. Rasio-rasio ini dapat menunjukkan kondisi keuangan daerah dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran. Menurut Suharno (2019), analisis rasio keuangan dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih baik. Rasio kemandirian keuangan, ketergantungan, efisiensi, dan derajat desentralisasi fiskal adalah beberapa rasio keuangan yang relevan untuk analisis kemandirian keuangan daerah adalah isu multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan fiskal hingga potensi sumber daya

Di era desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan. Desentralisasi merupakan suatu proses di mana wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi memiliki hubungan erat dengan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola dan membiayai program-program pembangunan dari sumber pendapatan lokal. Analisis rasio keuangan menjadi penting untuk memahami sejauh mana daerah dapat mandiri secara keuangan. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan, pemerintah daerah dapat lebih

leluasa dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten di Indonesia yang terletak di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang mengalami perkembangan pesat. Analisis kemandirian keuangannya sangat relevan untuk menilai seberapa jauh Sidoarjo dapat mengandalkan sumber pendapatan lokal dibandingkan dengan transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan berbagai potensi ekonomi yang ada, penting untuk mengevaluasi sejauh mana Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai kemandirian keuangan.

Salah satu tantangan utama dalam mencapai kemandirian keuangan adalah keterbatasan sumber daya lokal. Banyak daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, yang masih bergantung pada sektor tertentu, seperti pajak dan retribusi, untuk menghasilkan PAD. Menurut penelitian oleh Rahardjo (2021), keberagaman sumber pendapatan dapat meningkatkan stabilitas keuangan daerah.



Sumber: bpkad.sidoarjokab.go.id

Gambar 1. Grafik APBD Klasifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2023.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), PAD Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap perlu dioptimalkan untuk mencapai kemandirian yang lebih baik.

Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, peranan pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya akan disajikan melalui skripsi dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2023” dengan tujuan penelitian ini adalah mengenai bagaimana kondisi kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan analisis rasio keuangan pada tahun anggaran 2019-2023.

KAJIAN TEORITIS

Rasio Keuangan

Manurut Suharno (2019) Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas, termasuk pemerintah daerah. Rasio ini membantu dalam memahami hubungan antara berbagai akun dalam laporan keuangan, memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan, efisiensi operasional, dan kemandirian keuangan. Hidayat, R. (2021) menyebutkan Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rasio keuangan pemerintah daerah yakni; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Tranfer dari Pemerintah Pusat, Pengelolaan Anggaran, Kondisi Ekonomi Daerah, dan Kapasitas sumber daya manusianya.

Indikator Rasio Keuangan

1. Rasio Kemandirian Keuangan,

Dalam bukunya, Sihombing (2020) menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan merupakan salah satu parameter untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Rasio ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian dalam pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (2022) menekankan pentingnya rasio kemandirian keuangan sebagai indikator untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah melalui sumber pendapatan lokal. Rumus Rasio

$$\text{Kemandirian Keuangan: RKF} = \left(\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \right) \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sihombing (2020) menjelaskan bahwa rasio ketergantungan keuangan menunjukkan seberapa besar proporsi pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer. Rasio ini penting untuk mengevaluasi kemandirian keuangan daerah dan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Rumus Rasio Ketergantungan:

$$\text{RKD} = \left(\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu entitas, termasuk pemerintah daerah, dalam menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam bukunya, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa rasio efisiensi menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan pengeluaran. Rasio ini penting untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil yang diinginkan.

$$\text{Rumus Rasio Efisiensi} = \left(\frac{\text{Belanja}}{\text{Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Rasio ini sering kali dihitung dengan membandingkan proporsi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah (Pendapatan Asli Daerah atau PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rumus Rasio

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal: DDF} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Teori kemandirian keuangan pemerintah daerah menjelaskan kemampuan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Teori Desentralisasi

Teori Desentralisasi merujuk pada proses di mana kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam buku Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa desentralisasi penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada Rumusan Masalah diatas mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019-2023" memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Bagaimana kondisi kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan analisis rasio keuangan pada tahun anggaran 2019-2023?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini ditujukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2019-2023 sebagai sampel dan populasinya.

HASIL LUARAN YANG DICAPAI

Analisis rasio keuangan untuk mengukur Kemandirian Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan proses penilaian terhadap Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo yang telah disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan, Rasio Efisiensi, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berikut data hasil perhitungan dari rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Gambar 2. Grafik Perbandingan Hasil Analisis Rasio Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Berdasarkan perhitungan Analisis Rasio Keuangan dengan hasil Rasio Kemandirian Keuangan yang bernilai tinggi, hal tersebut akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dan pendapatan yang dihasilkan dari

pajak dan retribusi, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana eksternal, yang dapat menghambat otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan.

Rasio Kemandirian Keuangan (RKF)

Rasio kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019-2023:

Tabel 2. Perhitungan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Transfer	% RKF	Kriteria
2019	1,689,953,213,262.69	2,590,752,114,232.00	65.23%	Partisipasif
2020	1,798,515,529,274.65	2,436,766,013,307.00	73.81%	Partisipasif
2021	1,921,244,253,335.69	2,562,511,334,042.00	74.98%	Partisipasif
2022	1,801,982,663,587.19	2,699,903,720,332.00	66.74%	Partisipasif
2023	2,050,788,676,962.07	2,965,839,490,458.00	69.15%	Partisipasif
Rata-rata			69.98%	Partisipasif

Sumber : BPKAD Kabuten Sidoarjo (Diolah)

Berdasarkan pada perhitungan data pada tabel diatas, tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer dari tahun 2019-2023 memiliki persentase terendahnya 65.23% ditahun 2019 dan tertingginya 74.98% ditahun 2020 yang masuk dalam kriteria Partisipasif, dengan rata-rata dari perhitungan rasio tersebut masih menunjukkan angka 69.98% selama 5 tahan anggaran tersebut.

Rasio Ketergantungan (RKD)

Rasio ketergantungan keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan dan program-programnya. Berikut hasil perhitungan rasio ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019-2023:

Berdasarkan pada perhitungan data pada tabel diatas, tingkat ketergantungan pendapatan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo terhadap transfer pemerintah pusat dari tahun 2019-2023 masih tergolong sangat tinggi, karena rata-rata dari perhitungan rasio tersebut masih menunjukkan angka 57.48%. Dengan persentase ketergantungan tertingginya sebesar 59.93% ditahun 2022 dan terendahnya diangka 54.88% di tahun 2021.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan total biaya yang dikeluarkan untuk memungut

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan PAD. Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019-2023:

Tabel 4. Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Realisasi Total Belanja	% Efisiensi	Kriteria
2019	4,444,626,346,624.69	3,792,898,814,793.67	117.18%	Tidak Efisien
2020	4,411,615,214,581.65	3,844,638,464,890.05	114.75%	Tidak Efisien
2021	4,669,635,698,473.41	4,271,217,913,944.76	109.33%	Tidak Efisien
2022	4,504,849,594,847.19	4,849,911,746,143.62	92.89%	Efisien
2023	5,020,195,449,420.07	5,001,777,999,928.70	100.37%	Tidak Efisien
Rata-rata			106.90%	Tidak Efisien

Sumber : BPKAD Kabuten Sidoarjo (Diolah)

Berdasarkan pada perhitungan data pada tabel diatas, tingkat Efisiensi keuangan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo terhadap Belanja daerah dari tahun 2019-2023 dinyatakan tidak efisien, karena rata-rata dari perhitungan rasio tersebut masih menunjukkan angka 106.90%. Persentase rasio efisiensi terendahnya terjadi di tahun 2022 yakni dia angka 92.89% yang masuk dalam kriteria efisien, lalu di tahun lainnya persentsenya berada di angka lebih dari 100% sehingga masuk dalam kategori tidak efisien yang mana ditahun 2019 menjadi tahun dengan persentase tertinggi yakni sebesar 117.18%.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai belanja daerah. Berikut hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019-2023:

Tabel 5. Perhitungan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan	% DDF	Kriteria
2019	1,689,953,213,262.69	4,444,626,346,624.69	38.02%	Sedang
2020	1,798,515,529,274.65	4,411,615,214,581.65	40.77%	Baik
2021	1,921,244,253,335.69	4,669,635,698,473.41	41.14%	Baik
2022	1,801,982,663,587.19	4,504,849,594,847.19	40.00%	Baik
2023	2,050,788,676,962.07	5,020,195,449,420.07	40.85%	Baik
Rata-rata			40.16%	Baik

Sumber : BPKAD Kabuten Sidoarjo (Diolah)

Berdasarkan pada perhitungan data pada tabel diatas, tingkat Derajat desentralisasi fiskal keuangan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo terhadap Belanja daerah dari tahun 2019-2023 dinyatakan baik, karena rata-rata dari perhitungan rasio tersebut masih menunjukkan angka 40.16%. Persentase terendahnya berada diangka 38.02% di tahun 2019 dan tertinggi diangka 41.14% di tahun 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang di sampaikan sebelumnya, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari rasio keuangan pada tahun anggaran 2019 hingga 2023 dengan menggunakan 4 perhitungan rasio yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Secara umum, perhitungan rasio tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan yang lumayan dalam mengelola sumber daya lokal untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Tetapi, tingkat Ketergantungan pada pendapatan transfer masih cukup tinggi. Ini berarti Kabupaten Sidoarjo masih sangat bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat. Meskipun PAD Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik, namun untuk mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi, masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan seperti Diversifikasi Pendapatan, Peningkatan Efisiensi, dan Penguatan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kemandiriannya. Namun, diperlukan upaya yang lebih serius dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Kasmir, Y. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sukarna, S. (2019). "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Pemerintahan". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 25-38.
- Suharno. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(3), 76-89
- Hidayat, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sihombing, P. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers